

SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING
DI KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN
POLEWALI MANDAR



MUHDAR KONANG

F0118331

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING
DI KECAMATAN TUBBI TARAMANU KABUPATEN
POLEWALI MANDAR
NAMA : MUHDAR KONANG
NIM : F0118331
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan ujian Skripsi untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (SI)

Majene, 04 Juni 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Burhanuddin., M.Si

Nip:196209191989031004

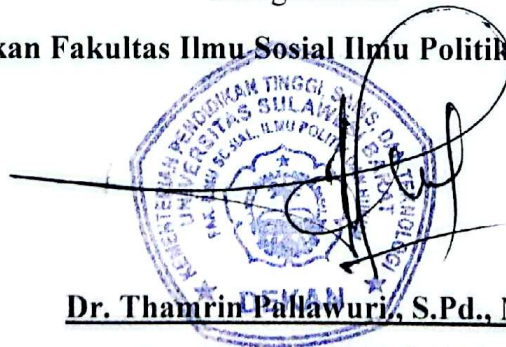


Pahrudin.M, S.Ip., M.Si

Nip: 19780111202411004

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Hukum



Dr. Thamrin Pallawuri, S.Pd., M.Pd

Nip:197001311998021005

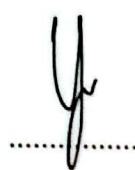
SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING DI KECAMATAN
TUBBI TARAMANU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Muhdar Konang
F0118331

Telah diajukan didepan Dewan penguji
Pada tanggal 26 Juni 2025

Susunan dewan penguji

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Rahmatullah, S.Sos., M.Si	Ketua Penguji	
Hendrawan, S.Sos., M.A.P	Penguji Utama	
Muhammad Yusri A.R., S.Ip. MA	Penguji/ Anggota	

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Burhanuddin., M.Si
Nip:196209191989031004

Pembimbing II



Pahrudin.M, S.Ip., M.Si
Nip:19780111202411004

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhdar Konang
Nim : F0118331
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Dan Hukum
Universitas : Sulawesi Barat

Dengan sesungguhnya saya menyatakan bahwa skripsi saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah di terbitkan/dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun. Apabila dikemudian hari saya kedapatan melanggar dan skripsi ini terdapat bukti adanya pemalsuan data, maka saya bersedia di berikan sanksi sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku.

Demikian surat penyampaian ini saya buat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima kasih.

Majene, 04 Juni 2025


Muhdar Konang

ABSTRAK

Konang, Muhdar. 2025. Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Dan Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar. Permasalahan stunting merupakan salah satu isu kesehatan masyarakat yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu telah berjalan, namun belum optimal. Beberapa faktor penghambat yang ditemukan antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi dan pola asuh anak juga menjadi kendala utama. Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah meliputi penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, serta pelibatan tenaga kesehatan dan kader Posyandu di tingkat desa. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi penggunaan dana desa, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat untuk mendukung efektivitas kebijakan penanganan stunting di wilayah tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Stunting, Kesehatan Masyarakat, Tubbi Taramanu, Polewali Mandar

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksanaan pemerintah dalam bidang kesehatan dan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan memiliki tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian urusan daerah dalam bidang kesehatan untuk menunjang tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan dan melakukan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.¹

Pemerintah Indonesia menanggapi masalah stunting yang mengancam masa depan generasi bangsa dengan menetapkan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 dengan pendekatan konvergen dan terintegrasi di seluruh wilayah. Kebijakan ini mengamanatkan BKKBN sebagai koordinator pelaksanaan di

¹ Fahriza, Erina. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hal 1.

lapangan, memperkuat peran keluarga dan pendampingan oleh petugas serta kader PKK dan bidan, serta menekankan pentingnya intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui program-program seperti penyediaan pangan bergizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, edukasi remaja dan calon pengantin, serta pembangunan sanitasi.

Untuk mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya Kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi “ bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus “. ²

Apapun masalah gizi yang sering kita jumpai adalah masalah Stunting. Stunting merupakan masalah gizi utama yang akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Stunting juga dapat terjadi sejak janin dalam kandungan akibat masalah kurang asupan protein pada saat

² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013

ibu sedang hamil juga dapat berpengaruh dari kondisi lingkungan. Masalah kurang energi protein (KEP) yaitu salah satu masalah utama gizi yang dapat berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak. Kekurangan energi dan protein dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan balita.

Stunting adalah ketidakseimbangan gizi yang merupakan penurunan kecepatan pertumbuhan dan gangguan pertumbuhan fisik.³ Standar WHO menunjukkan bahwa kategori stunting berada pada indeks panjang badan di banding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-core) kurang dari -2 SD.⁴ Masalah stunting masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Stunting merupakan permasalahan yang belum mampu di selesaikan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang telah melakukan berbagai cara untuk mencegah masalah penyakit stunting tersebut. Namun demikian, jumlah penyakit stunting masih meningkat setiap tahunnya. Bahkan pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan stunting di setiap daerahnya masing-masing. Sampai saat ini upaya pencegahan stunting masih belum berhasil dilakukan. Padahal dalam kebijakan penanganan stunting, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pencegahan agar masalah penyakit stunting tidak terus meningkat. Berbagai cara yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan stunting, salah satunya seperti mengeluarkan kebijakan

³ Loya RRP, Nuryanto N. (2017). *Pola asuh pemberian makan pada bayi stunting usia 6-12 bulan di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur*. Journal of Nutrition College;6(1):84-95.

⁴ *Ibid*.

pencegahan stunting, namun hal tersebut belum dapat menurunkan masalah penyakit stunting di setiap tahunnya. Dari data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kejadian stunting masih sangat tinggi, yaitu sebesar 36,8% pada tahun 2007, 35,6% pada tahun 2010, 37,2% pada tahun 2013, 27,5% pada tahun 2016, dan 29,6% di tahun 2017. Riset kesehatan dasar.⁵

Kebijakan penanganan stunting di Indonesia sendiri telah diatur dalam beberapa bentuk peraturan, yaitu seperti UU NO. 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang terdapat dalam pasal 141, 142, dan 143. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa perbaikan gizi diarahkan kepada upaya memperbaiki pola konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang, meningkatkan kesadaran perilaku gizi, melakukan aktivitas fisik dan kesehatan, meningkatkan ketercapaian sarana dan mutu pelayanan gizi, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, serta upaya meningkatkan kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam menjamin ketersediaan bahan makanan.⁶

Pemerintah dalam penanganan stunting agar anak-anak sebagai masa depan mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain fokus dalam penanganan, anak yang sudah terkena stunting karena hasil yang didapatkan tidak sempurna. Penanganan terhadap anak yang terkena stunting dilakukan dengan cara memberikan gizi,

⁵ Kementerian Kesehatan RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia. Jakarta: Buletin Jendela Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, ISSN 2088 – 270 X Semester I, 2018.

⁶ Aprilia, K., & Rahmadani, Y. (2022). implementasi kebijakan penanganan dan penanggulangan stunting. *implementasi penanganan dan penanggulangan stunting*, 5(3), Hal 1-8.

perawatan, dan pengobatan sampai anak tersebut sehat kembali namun tingkat kecerdasan tidak optimal serta masih tetap berbadan pendek.

Kebijakan ini diharapkan mampu mencegah angka stunting di indonesia. Pemberian pangan yang bergizi kepada anak untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhan kerarah yang lebih baik. Kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam pembangunan kesehatan terutama gizi masyarakat.

Salah satu wilayah di kabupaten polewali mandar yang mempunyai masalah stunting adalah kecamatan tubbi taramanu dimana di temukan satu atau lebih kasus stunting di daerah tersebut. Data menunjukkan di kecamatan tubbi taramanu dari jumlah balita yang dikukur sebanyak 1621 balita dengan jumlah stunting 46. Bukan hanya itu, 5 tahun terakhir sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 angka penurunan stunting di kecamatan tubbi taramanu hanya berkurang sekitar 2% dan bahkan pada tahun 2023 ke tahun 2024 mulai naik kembali. Hal ini di sebabkan karena dikecamatan tubbi taramanu merupakan daerah yang di mana penduduknya mempunyai mata pencaharian dengan penghasilan yang rata-rata setiap penduduk di bawah upah minimum regional (UMR). Hal tersebut jelas bahwa minimnya pendapatan dalam keluarga menjadi sebuah keterbatasan untuk mendapatkan makanan yang bergizi, sehingga pola asuh ibu terhadap bayi cenderung tidak menghiraukan pentingnya asupan gizi terhadap bayi dan berpotensi terjadi stunting. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dari masyarakat dan pendidikan

kesehatan masyarakat masih sangat rendah. Salah faktor penyebab stunting adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan perilaku mengasuh yang masih kurang dipraktikkan oleh seorang ibu. Faktor utama penyebab dari rendahnya kesadaran masyarakat dan perilaku adalah masih kurangnya pemahaman dan sikap masyarakat terkait pentingnya kesehatan masyarakat itu sendiri.⁷ Ibu mempunyai peran utama dalam keluarga menjadi hal yang sangat penting dalam mempengaruhi konsumsi makanan keluarga termasuk dalam hal menyiapkan makanan. Pemahaman ibu menjadi sangat penting dalam peningkatan gizi pada keluarga.⁸

Kecamatan Tubbi Taramanu dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan stunting. Sebagian besar penduduknya berpenghasilan di bawah upah minimum regional, sehingga akses terhadap makanan bergizi sangat terbatas. Selain itu, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta tingkat pendidikan kesehatan masyarakat masih rendah. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana kesehatan. Dengan demikian, penelitian di lokasi ini sangat relevan untuk mengidentifikasi hambatan dan potensi solusi yang dapat diimplementasikan secara nyata sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.

Dukungan pemerintah dan tenaga kesehatan menjadi hal yang paling utama dalam penanganan stunting. Maka dari itu perlunya perhatian dari semua kalangan agar pencegahan stunting menjadi masalah yang dapat

⁷ Bukit, D. S., Keloko, A. B., & Ashar, T. (2021). *Dukungan tenaga kesehatan dalam pencegahan stunting di Desa Tuntungan 2 Kabupaten Deli Serdang*. *Tropical Public Health Journal*, 1(2), 67-71.

⁸ *Ibid.*

diselesaikan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah dan tenaga kesehatan.⁹

Tingginya prevalensi stunting mencerminkan tantangan kesehatan masyarakat dan pembangunan manusia yang perlu segera diatasi. Kondisi ini juga mencerminkan potensi adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar kesehatan dan gizi bagi anak-anak di Kecamatan Tutar.

Ketersediaan sumber daya dan dukungan kebijakan publik merupakan aspek penting dalam upaya penanganan stunting. Dengan menyajikan latar belakang tentang status sumber daya dan kebijakan saat ini di Kecamatan Tutar, proposal dapat merujuk pada kebutuhan tambahan atau penyesuaian yang diperlukan.

Keterlibatan Pihak Terkait seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta merupakan langkah penting dalam merancang dan melaksanakan program penanganan stunting yang efektif dan berkelanjutan.

Tingginya prevalensi stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu mencerminkan tantangan besar dalam pembangunan manusia dan kesehatan masyarakat yang perlu segera diatasi. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan stunting, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan

⁹ Dhani, B. S., Alam, K. B., & Taufik, A. (2022). *Dukungan tenaga kesehatan dalam pencegahan stunting, stunting, dukungan, tenaga kesehatan*(1), 67.

rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya penanganan stunting secara terintegrasi dan berkelanjutan, demi mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif di masa depan

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait kebijakan tentang penanganan stunting di kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan judul penelitian yaitu “Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kecamatan Tutar Kabupaten Polewali Mandar.”

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penanganan stunting di kecamatan tubbi taramanu. Maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademik

Diharapkan nantinya dapat memberikan wawasan akademik bagi mahasiswa untuk di jadikan pengetahuan tambahan dan dapat pula di jadikan sebagai sumber bacaan dan sebagai sumber informasi mengenai masalah stunting yang ada di Kecamatan Tubbi Taramanu.

2. Manfaat praktis

Di harapkan dapat meningkatkan peranan pemerintah dalam penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu.

3. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti mengenai bagaimana kebijakan tenaga kesehatan dalam penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti memerlukan beberapa penelitian terdahulu, sebagai pertimbangan antara peneliti terdahulu dengan yang dilakukan oleh penulis terkait mengenai masalah kebijakan tenaga kesehatan dalam penanganan stunting.

Adapun penelitian terdahulu yang sudah melakukan penelitian mengenai masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ayu Fatmawati (2020), dengan penelitiannya yang berjudul efektivitas program pencegahan stunting didesa padasari kecamatan cimalaka kabupaten sumedang. Penelitian ini bertujuan bagaimana pelaksanaan efektivitas program pelaksanaan stunting didesa padasari kecamatan cimalaka kabupaten sumedang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.seperti wawancara, observasi,dokumentasi dan triangulasi. Adapun hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pencegahan stunting di desa padasari kecamatan cimalaka babupaten sumedang sudah dilaksanakan sesuai dengan ukuran-ukuran efektivitas program secara efektif, akan tetapi masih belum optimal.¹⁰ Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang masalah stunting. Dari segi perbedaan

¹⁰ Ayu, F. (2020). *efektivitas program pencegahan stunting. sumedang, indonesia/jawa barat, indonesia/ sumedang*: STIA sebelas april.

penelitian ini mengkaji tentang efektivitas program pelaksanaan stunting, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah implementasi kebijakan dari penanganan stunting.

2. Dela Rosita Sari (2023), dengan judul penelitiannya implementasi kebijakan penanganan stunting difekon pamenang kecamatan pagelarang kabupaten pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan stunting difekon pamenang kecamatan pagelarang kabupaten pringsewu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanganan stunting di fekon pamenang belum dilaksanakan dengan baik dengan tiga pilar keberhasilan implementasi menurut Jones (1996) organisasi, interpretasi, dan penerapan.¹¹ Persamaan dari penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan adalah dari segi implementasi kebijakan penanganan stunting. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah mengenai permasalahan yang diangkat serta lokasi penelitian yang berbeda.
3. Winda Angraeni (2022), dengan judul penelitiannya *collaborative governance* dalam pelaksanaan program penanganan stunting (studi: peran PKK di kelurrahan tanjungmas kecamatan semarang utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pelaksanaan *collaborative governance* dalam program penanganan stunting oleh PKK kelurahan

¹¹ Dela, S. R. (2023, januari kamsi). *implementasi kebijakan penanganan stunting. implementasi, pananganan stunting, organisasi, interpretasi*. bandar lampung, indonesia/lampung, indonesia/lampung: universitas lampung.

tanjung mas dan mendiskripsikan peran PKK dalam proses kolaborasi di kelurahan tanjung mas. Metode yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di kelurahan tanjung mas, kecamatan semarang utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan beberapa kegiatan yaitu program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian imunisasi dan pemberian vitamin, pemantauan gizi dan berat badan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan komitmen dari masyarakat khususnya pada PKK bersama dengan elemen masyarakat melakukan pencegahan stunting.¹² Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang masalah stunting. Dari segi perbedaan penelitian ini membahas tentang kolaborasi pemerintah dengan pemerintah setempat, yaitu PKK dalam program penanganan stunting. Sedangkan yang akan dilakukan peneliti adalah melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penanganan stunting.

4. Sri Hajjah Purba (2019), dengan judul penelitiannya analisis implementasi kebijakan penurunan stunting didesa secanggang kabupaten langkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan penanggulangan penurunan stunting didesa secanggang kabupaten langkat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kombinasi (mixed method research) yaitu metode yang digunakan antara metode kualitatif dan kuantitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa

¹² Winda, A. (2022, desember jum'at). *collaborative governance dalam pelaksanaan program penanganan stunting. collaborative governance, stunting dan PKK*. semarang, indonesia/jawa tengah, indonesia/semarang utara: universitas walisongo.

implementasi kebijakan penurunan stunting didesa secanggang kabupaten langkat sudah di laksanakan dengan baik dan sesuai dengan kabupaten Nomor 10 tahun 2018 tentang penurunan stunting, tetapi masih ada program dari kebijakan tersebut belum terlaksana secara optimal seperti pemberian ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini (IMD).¹³ Dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan mempunyai persamaan dengan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penanganan stunting. Dari segi perbedaan penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi (gabungan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif), sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah metode kualitatif saja dengan pendekatan deskriptif. Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan penelitian yang akan peneliti teliti dengan penelitian diatas yakni sama-sama membahas kebijakan terhadap beberapa permasalahan yang dikaji untuk lebih memperdalam pembahasan peneliti. Selain persamaan ada pula perbedaannya yakni lokasi penelitian yang berbeda. Perbedaan lokasi penelitian dapat mempengaruhi hasil dari penelitian di karenakan kondisi masyarakat, lingkungan serta daerah yang berbeda. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tenaga kesehatan dalam penanganan stunting di kecamatan tubbi taramanu kabupaten polewali

¹³ Sri, P. H. (2019, juli selasa). *analisis implementasi kebijakan penurunan stunting. implementasi, kebijakan, penurunan, strunting*. medan, indonesia/sumatra indonesia, indonesia/ medan: uin sumatra utara medan.

mandar sudah melaksanakan namun belum sesuai dari apa yang diharapkan. maka dari itu penting untuk penulis teliti disamping itu dapat memberikan masukan kepada tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan penanganan stunting yang ada di kecamatan tubbi tarumanu.

B. Kajian Teori

1. Implementasi kebijakan

Kebijakan terbentuk melalui beberapa proses yaitu penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan lahirnya kebijakan baru. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan karena pada tahap ini kebijakan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tahap implementasi ini akan terlihat dampak dari kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat apakah dampak yang baik mampu mengatasi permasalahan masyarakat atau sebaliknya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya.¹⁴

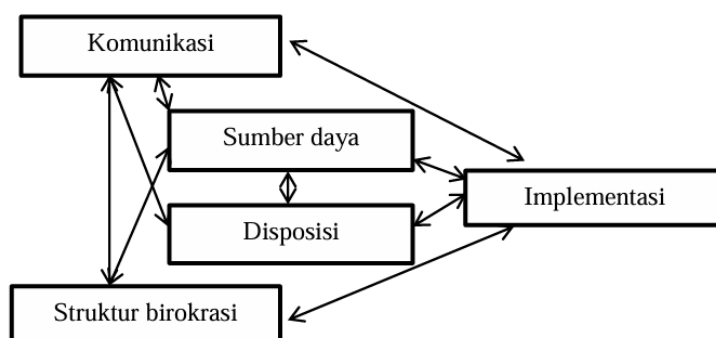
Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda

¹⁴ Nurkhililah, D. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Fisiologi Masyarakat Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

kebijaksanaan.¹⁵ Dari pendapat tersebut diatas tentang implementasi kebijakan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk menjalankan kebijakan, yang ditujukan kepada kelompok sasaran untuk mewujudkan kegiatan kebijakan.

2. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III (1980) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai proses yang penting karena suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III (1980) ditentukan oleh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain jika digambarkan seperti gambar berikut ini :



Gambar 1. Model implementasi kebijakan Goerge C. Edward III

Sumber: Edward III dalam Dela (2023)

Edward III dalam Dela (2023) beranggapan bahwa implementasi kebijakan dapat dipengaruhi dari empat variabel, yaitu:

¹⁵ Promono, Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press. hal-1-2.

a. Komunikasi

Menurut George Edward III, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, atau pesan dari satu pihak kepada pihak lain melalui berbagai saluran atau media, dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku, sikap, atau pengetahuan penerima.

Komunikasi merupakan salah-satu indikator penting yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan publik, karena menentukan dari pencapaian tujuan kebijakan publik itu sendiri. komunikasi harus dilakukan secara efektif antara para pelaksana program dengan para kelompok sasaran. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, tujuan ataupun sasaran kebijakan untuk selanjutnya dijelaskan dengan baik dan jelas kepada kelompok sasaran, sehingga mengurangi penyimpangan dalam implementasi.

b. Sumber daya

Sumber daya adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Sumber daya merupakan hal penting dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan. Apabila isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus didukung dengan sumber daya yang layak dan memadai. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, kompetensi implementor dan juga sumber daya finansial. Edward III dalam Dela

(2023) menyatakan bahwa sumber daya diposisikan sebagai input dalam suatu organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Sumber daya juga berkaitan dengan biaya atau pengorbanan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam proses implementasi kebijakan.

c. Disposisi atau sikap pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana yaitu karakteristik atau watak yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan, antara lain kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis. Apabila sikap para pelaksana mempunyai kecenderungan pada sikap positif serta adanya dukungan yang diberikan pada proses implementasi kebijakan maka kemungkinan besar tujuan awal yang telah ditentukan akan tercapai. Namun sebaliknya, apabila sikap para pelaksana bersikap negatif dan menolak terhadap proses implementasi kebijakan karena terdapat konflik kepentingan maka hal tersebut dapat menjadi kendala yang serius jika tidak diatasi (Dela, 2023).

d. Struktur birokrasi

Menurut George C. Edwards III, struktur birokrasi merujuk pada organisasi dan hierarki dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan publik. Struktur birokrasi dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Struktur birokrasi mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam proses implementasi kebijakan (Edwards III dalam Dela, 2023). Implementasi kebijakan kaitannya erat dengan birokrasi. Keberadaan

birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintahan, tetapi juga ada dalam organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Aspek penting dalam struktur organisasi adalah dengan adanya SOP (standard operating procedures). SOP tersebut dijadikan pedoman bagi setiap pelaksana kebijakan untuk bertindak. SOP tersebut juga dapat berupa struktur organisasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang dan rumit akan cenderung melemahkan pengawasan serta menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur birokrasi yang baik adalah struktur organisasi yang tidak berbelit belit dan efektif.

3. Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan (*policy*) dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi maupun privat, kebijakan bebas dari konotasi yang cukup dalam kata politis (*political*) yang diyakini mengandung makna “keberpihakan” dan korupsi.

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang di usulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁶ Dari pengertian tersebut tentang kebijakan dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu rencana atau tindakan seseorang kelompok atau pemerintah yang diarahkan untuk dapat mewujudkan tujuan tertentu.

¹⁶ Hernama , D., Ulumuddin , A., & Yudiardi, d. (2019). *kebijakan publik*. garut: universitas garut. hal 15

4. pengertian kebijakan publik

Secara umum kebijakan publik adalah alat untuk mewujudkan nilai-nilai yang diidealkan masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. Oleh karena itu suatu program merupakan turunan dari kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau kelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.¹⁷ Sedangkan menurut Dye mengartikan kebijakan publik sebagai “*whatever goverment choose to do or not to do*“. kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.¹⁸ Dari pengertian tersebut tentang kebijakan publik dapat di ambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang di buat oleh suatu negara. Kebijakan selalu ada dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, kelompok, sampai aspek kehidupan manusia yang berorganisasi sebagai suatu tindakan atau strategi untuk merealisasikan tujuan dari suatu negara.

¹⁷ Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik*. semarang: fakultas ilmu sosial negeri semarang dan Widya karya semarang.

¹⁸ *Ibid*.

5. Pengertian stunting

Stunting merupakan kegagalan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi secara kronis sehingga menyebabkan anak memiliki tinggi badan yang terlalu pendek dibandingkan usianya. Balita pendek (stunted) dan sangat pendek (severely stunted) merupakan kategori balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) yang tidak sesuai di bandingkan dengan standar baku. Adapaun ciri-ciri anak stunting antara lain: keterlambatan pertumbuhan utamanya pada tinggi badannya, pertumbuhan gigi terlambat, performa yang buruk pada kemampuan focus dan memori belajar, berat badan tidak naik (tetap atau menurun) anak mudah terserang berbagai penyakit infeksi.¹⁹

6. penyebab stunting

Stunting terjadi karena disebabkan berbagai faktor dan tidak hanya diakibatkan oleh gizi buruk yang dialami anak dan ibu hamil. Ada beberapa faktor penyebab stunting yakni:

a. Faktor Ekonomi

Pendapatan keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan stunting pada anak di bawah usia 5 tahun. Berdasarkan karakteristik pendapatan keluarga, krisis ekonomi merupakan salah satu penyebab utama yang mempengaruhi keterlambatan tumbuh kembang anak dan berbagai masalah gizi. Sebagian besar anak stunting

¹⁹ Sulistiani , R. P., Puspitasari, D. A., Wirandoko, I. H., Wicaksono, D., Aghadiati, F., Faraningsih, et al. (2023). *Stunting dan gizi buruk*. semarang: pradina pustaka.

berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Status ekonomi yang rendah mempengaruhi kemungkinan terjadinya insufisiensi dan kualitas pangan akibat rendahnya daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang demikian membuat anak stunting sulit mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga tidak dapat mengejar ketertinggalan dengan baik.²⁰

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah tingkat akhir yang dicapai oleh seseorang, dimana pendidikan adalah sarana untuk bertindak secara ilmiah. Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan gizi buruk, karena berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menerima dan memahami sesuatu, karena tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kebiasaan konsumsi makanan melalui bagian dari sistem pangan pada balita. Pelatihan ibu muncul sebagai prediktor terkuat dari stunting, sebagai faktor keluarga yang dapat dimodifikasi, dengan hubungan yang kuat dan konsisten dengan gizi buruk (Hagos et al. 2017).²¹

c. Faktor Lingkungan

Berkaitan dengan lingkungan, kebiasaan makan mempengaruhi pembentukan perilaku makan berupa lingkungan keluarga melalui

²⁰ Adriani , P., Aisyah, I. S., Wirawan, S., Hasanah, L. N., Idris, Nursiah, A., et al. (2022). *Stunting pada anak. padang sumatra barat: global eksekutif teknologi*.

²¹ *Ibid.*

promosi, media elektronik dan media cetak. Lingkungan rumah dan lingkungan sekolah akan menentukan pola makan mereka. Promosi iklan makanan juga akan menarik seseorang yang akan mempengaruhi konsumsi makanan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan makan seseorang.²²

Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang akan menyebabkan janin mengalami *intrauterine growth retardation* (IUGR), sehingga bayi yang akan lahir dengan kurang gizi, dan mengalami gangguan pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang, dan meningkatnya kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang stunting.²³

7. Konvergensi Pencegahan Stunting

Konvergensi merupakan sebuah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama kepada target sasaran wilayah geografis dan rumah tangga prioritas untuk mencegah stunting.

²² *Ibid.*

²³ Yuliana, W., & Hakim, B. N. (2019). *Darurat stunting dengan melibatkan keluarga. kabupaten takalar*: Yayasan ahmar cendekia indonesia.

Pencegahan stunting akan berhasil apabila kelompok sasaran prioritas mendapatkan layanan secara simultan. Oleh karena itu, konvergensi perlu segera dilakukan untuk mempercepat upaya pencegahan stunting. Konvergensi layanan intervensi pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan program pemerintah secara lintas sektor untuk memastikan tersedianya setiap layanan intervensi kepada rumah tangga 1.000 HPK. Proses konvergensi membutuhkan pendekatan perubahan perilaku lintas sektor agar layanan layanan tersebut digunakan oleh sasaran rumah tangga 1.000 HPK.²⁴

C. Kerangka Fikir

Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang dan tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO (World Health Organization). Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak “setiap anak berhak untuk hidup, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”²⁵ Mereka juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kesehatan fisik, mental spritual dan sosial”. Diharapkan semua pihak berperan dalam menciptakan

²⁴ Bappenas. (2018). *Intervensi Penurunan Stunting*. In *Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten/Kota* (Issue Juni).

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

lingkungan yang nyaman agar anak dapat mengembangkan bakat atau potensi yang dimiliki dan menjadi generasi yang berkualitas.

Masalah stunting adalah masalah yang sangat serius yang perlu ditangani bersama oleh seluruh lapisan masyarakat karena stunting dalam pembangunan kesehatan sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan kesehatan yang erat kaitannya dengan sumber daya manusia dan kehidupan manusia. Dengan demikian adanya kebijakan pemerintah dalam penanganan stunting memberikan dampak baik bagi kesehatan masyarakat yang sehat, cerdas, sejahtera serta bahagia. Untuk menangani dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentu bukanlah suatu hal yang mudah, untuk kesuksesan kebijakan tersebut harus ada dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak agar kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik, terarah, dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Suatu kebijakan penanganan stunting dapat dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut sesuai dengan tindakan yang di arahkan dan dapat mewujudkan tujuannya. George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi publik adalah kurangnya perhatian pada persoalan implementasi kebijakan. Menurut Edward, tanpa implementasi yang efektif, maka keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, Edward menyarankan empat isi pokok yang harus diperhatikan, yaitu komunikasi (communication) sumber

daya (resources) komitmen (disposition or attitude), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).²⁶

a. Komunikasi

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik bila komunikasi berjalan dengan baik karena dengan dilakukannya komunikasi yang baik maka implementator akan dapat secara konsisten melaksanakan setiap kebijakan. Untuk mengukur keberhasilan komunikasi antara lain :

- 1) Transmisi/penyaluran informasi
- 2) Kejelasan dalam menyampaikan informasi
- 3) Konsistensi dalam memberikan perintah

b. Sumber daya

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah adanya dukungan sumber daya dalam organisasi. Adapun indikator sumber daya meliputi :

- 1) Adanya dukungan pegawai yang memadai serta memiliki sejumlah kompetensi yang dibutuhkan.
- 2) Adanya informasi terkait cara melaksanakan kebijakan
- 3) Adanya wewenang yang jelas kepada pelaksana kebijakan
- 4) Adanya dukungan fasilitas yang memadai bagi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan.

²⁶ Handoyo, E. (2012). *Kebijakan publik. Semarang*: fakultas ilmu sosial negeri Semarang dan Widya karya Semarang

c. Disposisi

Disposisi adalah sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan berupa tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan. Sikap pelaksana dalam melaksanakan kebijakan antara lain :

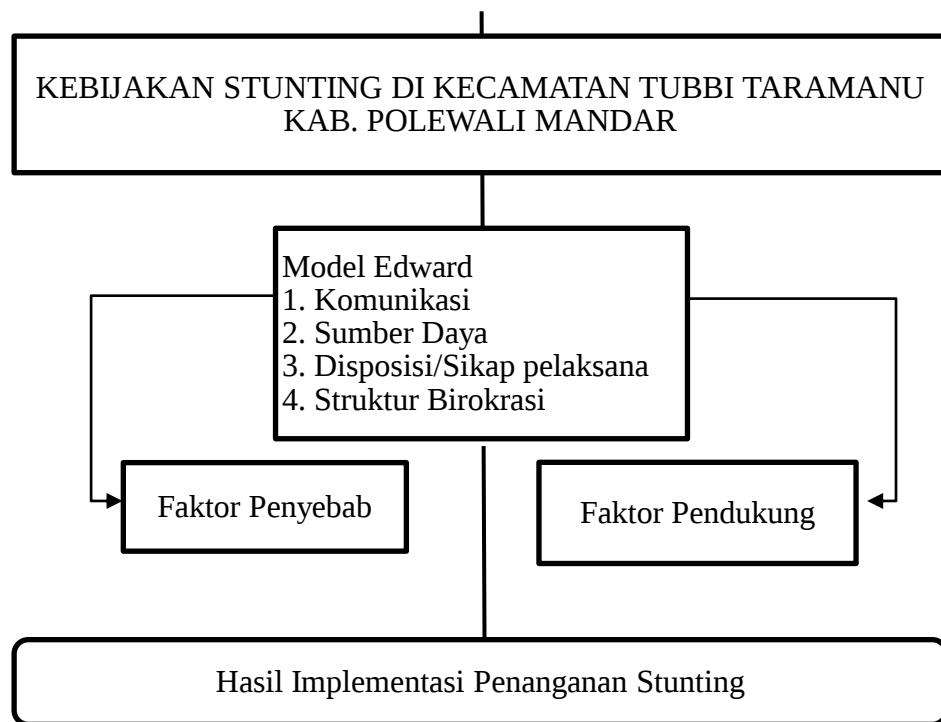
- 1) Adanya kesesuaian dalam penentuan pegawai yang melaksanakan kebijakan
- 2) adanya pembagian kerja sesuai dengan kemampuan pegawai
- 3) adanya pemberian insentif sebagai motivasi bagi pelaksana kebijakan

d. Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh adanya struktur birokrasi yang dapat meningkatkan kerjasama dan suasana kondusif di dalam lingkungan kerja.

- 1) Adanya SOP/ panduan yang bertujuan memastikan pekerjaan dan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar sebagai pedoman dalam melaksanakan kebijakan.
- 2) adanya standar kerja bagi pelaksana kebijakan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari
- 3) Adanya pembagian tanggungjawab kepada masing-masing petugas pelaksana untuk memudahkan implementasi kebijakan.

Dari keempat penjelasan variabel diatas, sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penulis menjadikan sebagai pedoman terkait dengan implementasi kebijakan tenaga kesehatan dalam penanganan stunting di kecamatan tubbi taramanu.



Gambar: 2. Kerangka Fikir

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu telah berjalan namun belum optimal. Beberapa hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penanganan stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu telah berjalan, namun belum optimal. Upaya pemerintah daerah sudah dilakukan melalui program-program pencegahan dan penanganan stunting, seperti penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang balita, pemberian makanan tambahan, serta pelibatan tenaga kesehatan dan kader Posyandu di tingkat desa.
2. Terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (khususnya tenaga kesehatan dan kader), keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama ibu-ibu balita, mengenai pentingnya gizi dan pola asuh juga menjadi faktor penghambat utama.
3. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat belum berjalan secara maksimal, sehingga pelaksanaan program seringkali tidak terintegrasi dan kurang berkelanjutan.

4. Faktor ekonomi dan budaya turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Rendahnya pendapatan keluarga dan masih kuatnya kebiasaan makan tradisional yang kurang memperhatikan aspek gizi menjadi tantangan tersendiri dalam upaya menurunkan angka stunting di Kecamatan Tubbi Taramanu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Tenaga Kesehatan

Pemerintah daerah perlu menambah jumlah tenaga kesehatan, khususnya di desa-desa terpencil, serta meningkatkan kapasitas kader Posyandu melalui pelatihan rutin agar dapat memberikan edukasi gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara dinas kesehatan, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya, termasuk organisasi masyarakat, untuk memastikan program penanganan stunting berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Peningkatan Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Perlu dilakukan edukasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat, terutama ibu-ibu balita, tentang pentingnya gizi seimbang, pola asuh yang benar, dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Edukasi dapat dilakukan melalui penyuluhan, media sosial, dan kegiatan keagamaan atau adat setempat.

4. Optimalisasi Penggunaan Dana Desa dan Bantuan Sosial

Pemerintah desa diharapkan dapat mengalokasikan dana desa secara lebih proporsional untuk mendukung program penanganan stunting, seperti penyediaan makanan tambahan, perbaikan sanitasi, dan peningkatan sarana kesehatan.

5. Pendekatan Kultural dan Ekonomi

Program penanganan stunting perlu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat. Inovasi dalam pemberian makanan tambahan berbasis pang

an lokal serta pemberdayaan ekonomi keluarga dapat menjadi solusi yang efektif.

6. Pemantauan dan Evaluasi Berkala

Diperlukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan penanganan stunting agar dapat mengidentifikasi hambatan dan mencari solusi yang tepat secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani , P., Aisyah, I. S., Wirawan, S., Hasanah, L. N., Idris, Nursiah, A., Et Al. (2022). *Stunting Pada Anak*. Padang Sumatra Barat: Global Eksekutif Teknologi.
- Ayu, F. (2020). *Efektivitas Program Pencegahan Stunting*. Sumedang, Indonesia/Jawa Barat, Indonesia/ Sumedang: STIA Sebelas April.
- Bappenas. (2018). *Intervensi Penurunan Stunting*. In Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/Kota (Issue Juni).
- Bukit, D. S., Keloko, A. B., & Ashar, T. (2021). Dukungan Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Tuntungan 2 Kabupaten Deli Serdang. *Tropical Public Health Journal*, 1(2), 67-71.
- Dhani, B. S., Alam, K. B., & Taufik, A. (2022). Dukungan Tenaga Kesehatan Dalam Pencegahan Stunting. *Stunting, Dukungan, Tenaga Kesehatan*(1), 67.
- Dela, S. R. (2023, Januari Kamis). *Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting. Implementasi, Pananganan Stunting, Organisasi, Interpretasi*. Bandar Lampung, Indonesia/Lampung, Indonesia/Lampung: Universitas Lampung.
- Fahriza, Erina. (2021). *Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Et Al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera Barat: PT.GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Et Al. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.

- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Negeri Semarang Dan Widya Karya Semarang.
- Hardani, Dkk (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* .Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Grup
- Hernama , D., Ulumuddin , A., & Yudiardi, D. (2019). *Kebijakan Publik*. Garut: Universitas Garut.
- Kementerian Kesehatan RI. (2018). Situasi Balita Pendek (Stunting) Di Indonesia. Jakarta:Buletin Jendela Pusat Data Dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI, ISSN 2088 – 270 X Semester I, 2018.
- Loya RRP, Nuryanto N. (2017). Pola Asuh Pemberian Makan Pada Bayi Stunting Usia 6-12 Bulan Di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. *Journal Of Nutrition College*;6(1):84-95.
- Nurkholilah, D. (2021). *Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Fisiologi Masyarakat Di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Promono, Joko. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Unisri Press.
- R.Semiawan, C. (2010). *Metode Penellitian Kualitatif*. Jakarta: PT Grasindo.
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Sri, P. H. (2019, Juli Selasa). *Analisis Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting. Implementasi, Kebijakan, Penurunan, Strunting*. Medan, Indonesia/Sumatra Indonesia, Indonesia/ Medan: Uin Sumatra Utara Medan.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV

Sulistiani , R. P., Puspitasari, D. A., Wirandoko, I. H., Wicaksono, D., Aghadiati, F., Faraningsih, Et Al. (2023). *Stunting Dan Gizi Buruk*. Semarang: Pradina Pustaka.

Winda, A. (2022, Desember Jum'at). *Collaborative Governance Dalam Pelaksanaan Program Penangan Stunting*. Collaborative Governance, Stunting Dan PKK. Semarang, Indonesia/Jawa Tengah, Indonesia/Semarang Utara: Universitas Walisongo.

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.

Yuliana, W., & Hakim, B. N. (2019). *Darurat Stunting Dengan Melibatkan Keluarga*. Kabupaten Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/16897> Diakses 23 April 2024

<https://talenta.usu.ac.id/trophico/article/view/7264> Diakses 23 April 2024

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU NO. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan